



DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI  
KEMENTERIAN KEHUTANAN

**UN-REDD**  
PROGRAMME  
INDONESIA

**HASIL PENGUMPULAN DATA/INFORMASI/PETA  
DALAM RANGKA PENETAPAN KABUPATEN/KOTA PRIORITAS  
LOKASI *DEMONSTRATION ACTIVITIES* (DA) REDD+  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**DINAS KEHUTANAN**

Jalan S. Parman No. 09 Palu, Telp. (0451) 421260-421261 Fax (0451) 426860

---

**LAPORAN AKHIR (*FINAL REPORT*)**

**HASIL PENGUMPULAN DATA/INFORMASI/PETA  
DALAM RANGKA PENETAPAN KABUPATEN/KOTA PRIORITAS  
LOKASI *DEMONSTRATION ACTIVITIES* (DA) REDD+  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**Oleh :**

Ir. H. NAHARDI, MM.  
Ir. PEPI SAEFUL JALAL, MP.  
CECENG SUHANA, S.Hut.T. MM.  
MONANG HASIBUAN, S.Hut. MSI.  
POPPY OKTADIYANI, S.Hut.

DISUSUN ATAS KERJASAMA  
KELOMPOK KERJA REDD+ PROVINSI SULAWESI TENGAH  
*dengan*  
UN – REDD PROGRAMME INDONESIA

---

Palu, Maret 2012

## KATA PENGANTAR

---

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengumpulan data/informasi/peta, maka sesuai Surat Perintah Tugas Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 522/4378 /Ro.Huk tanggal 21 Nopember 2011 dilaksanakan pengolahan dan analisis data serta penyusunan Laporan Akhir (***Final Report***) hasil pengumpulan data/informasi/peta dalam rangka penetapan kabupaten/kota prioritas lokasi *Demonstration Activities* REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah.

Laporan ini merupakan keluaran/output akhir dari kegiatan pengumpulan data/informasi/peta yang telah dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Sulawesi Tengah dan merupakan bagian dari implementasi Program REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah.

Laporan ini juga berisi informasi tentang kondisi kelayakan kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah untuk ditetapkan sebagai kabupaten/kota prioritas lokasi *Demonstration Activities* (DA) REDD+ di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan mulai dari pelaksanaan kegiatan pengumpulan data/informasi/peta di kabupaten/kota sampai dengan tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

*Palu, Maret 2012*

*TIM PENYUSUN*

*Koordinator,*

***Ir. H. NAHARDI, MM***

## SUSUNAN TIM

---

- A. Koordinator : **Ir. H. NAHARDI, MM** (Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, **selaku** Ketua Umum I Kelompok Kerja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah)
- B. Ketua Tim : **Ir. PEPI SAEFUL JALAL, MP** (Kepala Bidang Bina Usaha Hasil Hutan Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, **selaku** Ketua Bidang *Demonstration Activities* (DA) Kelompok Kerja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah)
- C. Sekretaris : **CECENG SUHANA, S.Hut.T,MM.** (Kepala Seksi Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, **selaku** Anggota Bidang *Demonstration Activities* (DA) Kelompok Kerja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah)
- D. Anggota : 1. **MONANG HASIBUAN, S.Hut. M.Si** (Staf Balai Pemantapan Kawasan Hutan, **selaku** Anggota Bidang *Demonstration Activities* (DA) Kelompok Kerja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah)
2. **POPPY OKTADIYANI, S.Hut.** (Staf Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah, **selaku** Anggota Bidang *Demonstration Activities* (DA) Kelompok Kerja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah)

## DAFTAR ISI

---

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
SUSUNAN TIM .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Landasan Hukum .....	2
D. Ruang Lingkup dan Cakupan Kegiatan .....	2
BAB II KONDISI UMUM .....	4
A. Letak dan Luas .....	4
B. Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah .....	4
C. Laju Deforestasi .....	5
D. Pengelolaan Hutan .....	5
E. Kondisi Lahan Kritis .....	8
F. Perubahan Kawasan Hutan .....	8
G. Kondisi Biologi .....	10
H. Kondisi Fisik .....	11
I. Kondisi Demografis .....	12
BAB III METODOLOGI .....	13
A. Lokasi dan Waktu .....	13
B. Peralatan dan Obyek Kajian .....	13
C. Metode/Teknik .....	13
BAB IV DATA/INFORMASI/PETA .....	23
A. Dukungan Pemerintah Daerah .....	23
B. Demografi .....	25
C. Biofisik Sumberdaya Hutan .....	27
BAB V PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS DATA .....	30
A. Ukuran dan Nilai Indikator .....	30
B. Rekapitulasi Jumlah Nilai Indikator .....	31
C. Nilai Indikator Tertimbang (NIT) dan Total Nilai Prioritas (TNP) .....	32

D. Penentuan Kabupaten/Kota Prioritas .....	33
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	35
A. Kesimpulan .....	35
B. Rekomendasi .....	36
DAFTAR PUSTAKA .....	37
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	38

## DAFTAR TABEL

---

		Halaman
Tabel 1	Luas kawasan hutan sesuai fungsinya per-kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah .....	5
Tabel 2	Data IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT di Provinsi Sulawesi Tengah .....	6
Tabel 3	Rincian luas pencadangan areal HTR di Provinsi Sulawesi Tengah .....	7
Tabel 4	Produksi kayu bulat IUPHHK-HA di Provinsi Sulawesi Tengah .....	7
Tabel 5	Data IUIPHHK berdasarkan kapasitas produksi di Provinsi Sulawesi Tengah .....	7
Tabel 6	Jumlah IUIPHHK berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah .....	8
Tabel 7	Luas lahan kritis di dalam wilayah DAS berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah .....	8
Tabel 8	Data perkembangan penggunaan kawasan hutan tahun 2010.....	9
Tabel 9	Luas Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Pertanian/ Perkebunan dan Transmigrasi di Provinsi Sulawesi Tengah .....	10
Tabel 10	Tata Waktu ( <i>time schedule</i> ) pengumpulan data/informasi/peta dalam rangka penentuan kabupaten/kota prioritas lokasi <i>Demonstration Activities</i> (DA) REDD+ di Sulawesi Tengah .....	13
Tabel 11	Kriteria, indikator, dan pembobotan penentuan kabupaten/kota prioritas DA REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah .....	20
Tabel 12	Prosentase jumlah APBD yang dialokasikan untuk pembangunan kehutanan terhadap jumlah total APBD kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah tahun 2011 .....	23
Tabel 13	Organisasi/Lembaga Pengelola Hutan di kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah .....	24
Tabel 14	Kerjasama Pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan di kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah .....	24
Tabel 15	Kerjasama Swasta/NGO dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan di kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah .....	25
Tabel 16	Jumlah desa yang berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan di kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah .....	25

Tabel 17	Kepadatan penduduk desa-desa yang berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan di kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah .....	26
Tabel 18	Jumlah SDM berlatar belakang ilmu kehutanan termasuk SDM berpendidikan umum yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis kehutanan di kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah .....	26
Tabel 19	Data stock karbon yang tersimpan dalam wilayah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah berdasarkan hasil analisis spasial .....	27
Tabel 20	Perbandingan antara luas lahan kritis dan luas total kawasan hutan dalam wilayah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah berdasarkan hasil analisis spasial .....	27
Tabel 21	Perbandingan luas kawasan hutan dan luas total wilayah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah berdasarkan hasil analisis spasial .....	28
Tabel 22	Perbandingan luas penutupan lahan dan luas total kawasan hutan di wilayah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah berdasarkan hasil analisis spasial .....	28
Tabel 23	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh organisasi pengelola hutan dan/atau pemegang perizinan yang sah di bidang kehutanan terhadap luas total kawasan hutan di wilayah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah berdasarkan hasil analisis spasial .....	29
Tabel 24	Ukuran dan nilai masing-masing indikator yang dinilai pada kriteria dukungan pemerintah daerah per-kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah .....	30
Tabel 25	Ukuran dan nilai masing-masing indikator yang dinilai pada kriteria demografi per-kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah .....	30
Tabel 26	Ukuran dan nilai masing-masing indikator yang dinilai pada kriteria biofisik sumberdaya hutan per-kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah .....	31
Tabel 27	Rekapitulasi jumlah nilai indikator pada tiap kriteria yang dinilai per-kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah .....	32
Tabel 28	Hasil perhitungan Nilai Indikator Tertimbang (NIT) dan Total Nilai Prioritas (TNP) kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah .....	33
Tabel 29	Kabupaten/kota Prioritas Lokasi <i>Demonstration Activities (DA)</i> REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah .....	34



## DAFTAR LAMPIRAN

---

	Halaman
Lampiran 1	Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Indikator Penentuan Lokasi <i>Demonstration Activities</i> (DA) <i>Reducing Emmision from Deforestation and Forest Degradation</i> (REDD+) Provinsi Sulawesi Tengah ..... 39
Lampiran 2	Keputusan Gubernur Nomor : 522/84/DISHUTDA-G.ST/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang <i>Pembentukan Kelompok Kerja Reducing Emmision from Deforestation and Forest Degradation (POKJA REDD+)</i> Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 ..... 54
Lampiran 3	Surat Perintah Tugas Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 522/4378 /Ro.Huk tanggal 21 Nopember 2011 ..... 61
Lampiran 4	Data/Informasi/Peta Berdasarkan Kriteria Dan Indikator Per-Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penentuan Lokasi <i>Demonstration Activities</i> (DA) REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah ..... 63
Lampiran 5	Nilai Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Berdasarkan Indikator Masing-Masing Kriteria Dalam Rangka Penentuan Lokasi <i>Demonstration Activities</i> REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah ..... 66
Lampiran 6	Nilai Indikator Tertimbang (NIT) Dan Total Nilai Prioritas (TNP) Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Dalam Rangka Penentuan Lokasi <i>Demonstration Activities</i> REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah ..... 67
Lampiran 7	Kabupaten/Kota Prioritas Lokasi <i>Demonstration Activities</i> (DA) REDD+ di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah ..... 68
Lampiran 8	Peta Pengelolaan Kawasan Hutan Kabupaten/Kota se- Provinsi Sulawesi Tengah ..... 69
Lampiran 9	Peta Lahan Kritis Per-Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah ..... 80
Lampiran 10	Peta Kawasan Hutan Per-Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah ..... 91
Lampiran 11	Peta Penutupan Lahan Per-Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah ..... 102
Lampiran 12	Peta Stock Karbon Per-Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah ..... 113

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menindaklanjuti ditetapkannya Sulawesi Tengah sebagai provinsi percontohan upaya mitigasi perubahan iklim dalam skema REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation plus*) di Indonesia, maka sebagai sarana uji coba penerapan perangkat metodologi dan kelembagaan serta FPIC (*Free Prior Inform Concern*) yang dibangun untuk REDD+, perlu ditetapkan lokasi *Demonstration Activities* (DA) REDD+ di kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Penentuan kabupaten/kota prioritas lokasi *Demonstration Activities* (DA) REDD+ di Sulawesi Tengah dinilai sangat strategis dan penting agar kegiatan penetapan lokasi DA di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dapat segera terwujud sehingga agenda-agenda kegiatan REDD+ Sulawesi Tengah dapat dilaksanakan dengan terarah, berdayaguna, dan berhasilguna.

Pada prinsipnya seluruh kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai peluang dan kesempatan yang sama untuk ditetapkan sebagai kabupaten/kota *Demonstration Activities* (DA) REDD+. Namun untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi, maka perlu ditetapkan kabupaten/kota prioritas lokasi *Demonstration Activities* (DA) REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah.

Lokasi yang terpilih harus dinilai mampu memberikan kontribusi tinggi terhadap upaya penurunan emisi nasional yang berfungsi sebagai acuan bagi pelaksanaan REDD+ tahap selanjutnya.

Berpedoman pada Kriteria dan Indikator yang telah disepakati dan telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 40 Tahun 2011, Kelompok Kerja (POKJA) REDD+ Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan pengumpulan data/informasi/peta dari kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.

Sebagai bahan pertimbangan penetapan kabupaten/kota lokasi *Demonstration Activities* REDD+ di Sulawesi Tengah, maka dengan mengacu pada hasil

pengumpulan data/informasi/peta yang telah dilaksanakan disusunlah Laporan Akhir (*Final Report*) dalam rangka penetapan kabupaten/kota prioritas lokasi *Demonstration Activities* (DA) REDD+ Sulawesi Tengah.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan Akhir (*Final Report*) hasil pengumpulan data/informasi/peta ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kondisi kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah berdasarkan standar Kriteria dan Indikator yang telah ditetapkan dalam rangka penentuan kabupaten/kota prioritas lokasi *Demonstration Activities* (DA) REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan laporan akhir ini adalah tersedianya bahan pertimbangan dalam rangka penetapan kabupaten/kota prioritas lokasi *Demonstration Activities* (DA) REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah.

## **C. Landasan Hukum**

1. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Indikator Penentuan Lokasi *Demonstration Activities* (DA) *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Keputusan Gubernur Nomor : 522/84/DISHUTDA-G.ST/2011 tanggal 18 Februari 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* (POKJA REDD+) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011.
3. Surat Perintah Tugas Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 522/4378 /Ro.Huk tanggal 21 Nopember 2011

## **D. Ruang Lingkup dan Cakupan Kegiatan**

Kegiatan ini mencakup kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, meliputi : Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una Una, Kabupaten Morowali,

Kabupaten Banggai, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Data yang dikumpulkan dan diolah adalah data/informasi/peta sesuai kriteria dan indikator, yang terdiri dari :

1. Kriteria Dukungan Pemerintah Daerah, dengan indikator : distribusi alokasi anggaran pembangunan, organisasi/lembaga pengelola hutan, kerjasama pemerintah dengan masyarakat, dan kerjasama swasta/NGO dengan masyarakat.
2. Kriteria Demografi, dengan indikator : jumlah desa, kepadatan penduduk, dan sumberdaya manusia.
3. Kriteria Biofisik Sumberdaya Hutan, dengan indikator : stock karbon, luas lahan kritis, luas kawasan hutan, penutupan lahan hutan dan pengelolaan kawasan hutan.

## **BAB II KONDISI UMUM**

### **A. Letak dan Luas**

Provinsi Sulawesi Tengah dengan Ibukota Palu secara geografis terletak pada kedudukan geografis 2°22' Lintang Utara (LU) - 3°48' Lintang Selatan (LS) dan 119°22' - 124°22' Bujur Timur (BT).

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan provinsi terluas di Pulau Sulawesi, dengan luas wilayah daratan 68.033 km<sup>2</sup> dan luas wilayah laut 189.480 km<sup>2</sup>, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo
- Sebelah Timur : Provinsi Maluku
- Sebelah Selatan : Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara
- Sebelah Barat : Selat Makassar

Secara administratif Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari 10 (sepuluh) kabupaten dan 1 (satu) kota, terdiri dari : Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una Una, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

### **B. Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah**

Luas kawasan hutan sampai dengan tahun 2010 adalah 4.394.932 Ha atau 64,60% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, yang terdiri dari :

1. Kawasan Lindung, meliputi :
  - a. Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (darat dan perairan) seluas 676.248 Ha (9,94%).
  - b. Hutan Lindung seluas 1.489.923 Ha (21,90%).
2. Kawasan Budidaya, meliputi :
  - a. Hutan Produksi terbatas seluas 1.476.316 Ha (21,70%).
  - b. Hutan Produksi Tetap seluas 500.589 Ha (7,36%).
  - c. Hutan produksi Konversi seluas 251.856 Ha (3,70%).

3. Areal Penggunaan Lain seluas 2.408.368 Ha (35,40%).

Kondisi kawasan hutan sesuai fungsinya per-kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Tengah seperti terlihat pada **Tabel 1**.

**Tabel 1.** Luas kawasan hutan sesuai fungsinya per-kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah

Kabupaten/ Kota	Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsinya (Ha)						APL (Ha)	Luas Wilayah Kab/Kota (Ha)	% luas Kawasan Hutan terhadap luas Kab/Kota
	KSA- KPA	HL	HPT	HP	HPK	Jumlah			
Morowali	241.331	436.756	238.175	181.368	61.216	1.158.846	417.651	1.576.497	73,51
Banggai	23.726	169.669	309.113	55.526	52.529	610.563	329.990	940.553	64,92
Poso	126.739	140.287	136.372	22.716	16.969	443.083	427.048	870.131	50,92
Tojo Unauna	18.713	169.542	135.570	68.185	20.409	412.419	160.196	572.615	72,02
Parigi Moutong	60.714	162.640	127.607	22.467	22.808	396.236	207.301	603.537	65,65
Sigi	117.383	132.149	129.522	2.808	9.144	391.006	124.033	515.039	75,92
Donggala	18.353	100.846	164.905	8.816	24.152	317.072	194.221	511.293	62,01
Buol	9.802	63.602	100.341	60.413	24.070	258.228	158.613	416.841	61,95
Tolitoli	53.698	55.955	80.644	39.999	1.208	231.504	173.054	404.558	57,22
Bangkep	-	51.336	49.691	38.291	19.351	158.669	194.446	353.115	44,93
Palu	5.789	7.141	4.376	-	-	17.306	21.815	39.121	44,24
<b>TOTAL</b>	<b>676.248</b>	<b>1.489.923</b>	<b>1.476.316</b>	<b>500.589</b>	<b>251.856</b>	<b>4.394.932</b>	<b>2.408.368</b>	<b>6.803.300</b>	<b>64,60</b>

Sumber : Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2011

Dari tabel tersebut, seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah mempunyai prosentase luas kawasan hutan terhadap luas wilayah kabupaten/kota di atas 30% sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

### C. Laju Deforestasi

Berdasarkan hasil interpolasi data inventarisasi lahan kritis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2003 dan analisis Citra Satelit tahun 2010, laju deforestasi untuk periode tahun 2003-2010 rata-rata 28.463,88 hektar/tahun.

### D. Pengelolaan Hutan

#### 1. Pengelolaan Hutan Produksi

Pengelolaan hutan produksi di Provinsi Sulawesi Tengah sebagian besar dimanfaatkan dalam bentuk Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT).

Jumlah IUPHHK-HA sampai dengan tahun 2011 adalah sebanyak 11 (sebelas) Unit seluas 679.155 Ha dan IUPHHK-HT sebanyak 1 (satu) Unit seluas 13.400 Ha yang tersebar di 7 (tujuh) kabupaten.

Selain itu, sampai dengan tahun 2011 di Provinsi Sulawesi Tengah telah dicadangkan areal untuk pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas ± 23.375 Ha yang tersebar di 5 (lima) kabupaten.

Potensi produksi dari kawasan hutan produksi yang dikelola dan dimanfaatkan oleh IUPHHK-Hutan Alam di Provinsi Sulawesi Tengah berkisar antara 35 – 45 M<sup>3</sup>/Ha untuk semua jenis kayu berdiameter 50 Cm ke atas, sedangkan potensi hutan tanaman berkisar antara 100 – 150 M<sup>3</sup>/Ha.

Data IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT di Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan tahun 2011 diuraikan pada **Tabel 2**.

**Tabel 2.** Data IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT di Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Nama IUPHHK	Nomor dan Tanggal SK IUPHHK	Luas (Ha)	Lokasi (Kabupaten)
<b>I. IUPHHK-HA</b>				
1.	PT. Sulwood Export Development LTD	220/Kpts-II/1998, 27 Februari 1998	54.980	Donggala
2.	PT. Satyasena Indratama	81/Kpts-II/1997, 06 Pebruari 1997	67.820	Donggala
3.	PT. Tri Tunggal Ebony Corporation	98/Kpts-II/2000, 22 Desember 2000	98.000	Poso, Tojo Una-Una dan Morowali
4.	PT. Pasuruan Furnindo Industries	34/Kpts-II/2001, 13 Pebruari 2001	47.915	Poso
5.	PT. Balantak Rimba Rejeki Unit I Unit II	1117/Kpts-II/1992, 16 Desember 1992	37.000 72.500	Morowali Banggai
6.	PT. Dahatama Adikarya	465/Kpts-II/1995, 4 September 1995	64.620	Banggai
7.	PT. Bina Balantak Raya	334/Menhut-II/2004, 31 Agustus 2004	95.270	Banggai
8.	PT. Palopo Timber Company	269/Menhut-II/2004, 21 Juli 2004	38.250	Banggai
9.	PT. Satyaguna Sulanjaya	334/Menhut-II/2004, 31 Agustus 2004	27.740	Banggai
10.	PT. Sentral Pitulempa	558/Menhut-II/2006 29 Desember 2006	40.450	Tolitoli
11.	PT. Riu Mamba Karya Sentosa	40/Menhut-II/2006 23 Februari 2006	34.610	Poso
<b>Jumlah IUPHHK-HA</b>			<b>679.155</b>	
<b>II. IUPHHK-HT</b>				
1.	PT. Berkat Hutan Pusaka	146/Kpts-II/1996	13.400	Banggai
<b>Jumlah IUPHHK-HT</b>			<b>13.400</b>	
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>692.555</b>	

Sumber : Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2011

Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Provinsi Sulawesi Tengah tersaji pada **Tabel 3**.

**Tabel 3.** Rincian luas pencadangan areal HTR di Provinsi Sulawesi Tengah

No	Lokasi (Kabupaten)	Luas (Ha)	SK Pencadangan dari Menteri Kehutanan	
			Nomor	Tanggal
1.	Tojo Unauna	5.585	SK. 403/Menhut-II/2009	6 Juli 2009
2.	Parigi Moutong	10.445	SK. 456/Menhut-II/2009	4 Agustus 2009
3.	Banggai Kepulauan	3.575	SK. 51/Menhut-II/2010	15 Januari 2010
4.	Banggai	665	SK. 132/Menhut-II/2010	24 Maret 2010
5.	Tolitoli	3.105	SK. 133/Menhut-II/2010	24 Maret 2010
<b>Jumlah</b>		<b>23.375</b>		

Sumber : Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2011

Produksi kayu bulat Provinsi Sulawesi Tengah selama 3 (tiga) tahun terakhir (2008 s/d 2010) yang berasal dari IUPHHK-Hutan Alam tersaji pada **Tabel 4.**

**Tabel 4.** Produksi kayu bulat IUPHHK-HA di Provinsi Sulawesi Tengah

No.	Kabupaten	Produksi Kayu Bulat			Jumlah	Keterangan
		2008	2009	2010		
1.	Poso	6.400,24	-	-	6.400,24	
2.	Donggala	590,57	850,10	767,62	2.208,29	
3.	Tolitoli	-	-	-	-	
4.	Banggai	7.391,97	19.880,17	20.456,83	47.728,97	
5.	Buol	3.549,20	5.133,20	0,00	8.682,40	
6.	Morowali	-	10.051,52	0,00	10.051,52	
7.	Tojo Una Una	-	-	-	-	
<b>Jumlah</b>		<b>17.931,98</b>	<b>35.914,99</b>	<b>21.224,45</b>	<b>75.071,42</b>	

Sumber : Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2011

## 2. Pemanfaatan Hasil Hutan

Perkembangan jumlah Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di Provinsi Sulawesi Tengah selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2007 s/d 2011) diuraikan pada **Tabel 5** dan **Tabel 6.**

**Tabel 5.** Data IUPHHK berdasarkan kapasitas produksi di Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kapasitas Produksi (M <sup>3</sup> /Tahun)	Jumlah IUPHHK (Unit)
1.	< 2.000	240
2.	2.000 – 6.000	46
3.	> 6.000	1
<b>Jumlah</b>		<b>287</b>

Sumber : Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2011



**Tabel 6.** Jumlah IUIPHHK berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kabupaten/kota	Jumlah IUIPHHK (Unit)		
		Aktif	Tidak Aktif	Total
1.	Poso	3	9	12
2.	Donggala	24	4	28
3.	Tolitoli	19	5	24
4.	Banggai	25	33	58
5.	Buol	12	6	18
6.	Morowali	3	18	21
7.	Banggai Kepulauan	1	2	3
8.	Palu	37	34	71
9.	Parigi Moutong	13	26	39
10.	Tojo Una Una	7	4	11
11.	Sigi	1	1	2
<b>Jumlah</b>		<b>143</b>	<b>144</b>	<b>287</b>

Sumber : Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2011

### E. Kondisi Lahan Kritis

Sebaran dan luas lahan kritis di wilayah DAS berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada **Tabel 7**.

**Tabel 7.** Luas lahan kritis di dalam wilayah DAS berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kabupaten/kota	Sangat Kritis	Kritis	Agak Kritis	Jumlah Lahan Kritis	Lahan Tidak Kritis	Luas Wilayah	% Lahan Kritis
1	Banggai	4,413.08	22,976.57	100,402.16	127,791.81	755,750.73	883,542.54	14.46
2	BangKep	887.36	3,511.49	89,140.65	93,539.50	218,091.78	311,631.28	30.02
3	Buol	2.85	6,667.33	28,343.90	35,014.08	344,949.29	379,963.37	9.22
4	Donggala	105.21	25,590.49	62,265.38	87,961.08	398,425.11	486,386.20	18.08
5	Morowali	3,611.91	41,745.05	120,369.92	165,726.88	1,069,104.21	1,234,831.09	13.42
6	Palu	1,892.21	6,205.75	9,820.99	17,918.95	20,856.84	38,775.79	46.21
7	Parigi Moutong	896.93	60,133.63	70,939.00	131,969.56	460,367.95	592,337.51	22.28
8	Poso	4,035.14	16,164.81	75,285.97	95,485.92	631,538.62	727,024.53	13.13
9	Sigi	3,888.70	48,329.63	53,754.34	105,972.67	422,268.50	528,241.16	20.06
10	Tojo Una-una	3,950.76	18,812.09	62,010.22	84,773.07	405,043.69	489,816.75	17.31
11	Tolitoli	454.54	14,668.21	38,556.26	53,679.01	305,957.64	359,636.64	14.93
<b>SULAWESI TENGAH</b>		<b>24,138.69</b>	<b>264,805.05</b>	<b>710,888.79</b>	<b>999,832.53</b>	<b>5,032,354.36</b>	<b>6,032,186.86</b>	<b>16.57</b>

Sumber : BPDAS Palu - Poso Tahun 2009, diolah kembali

### F. Perubahan Kawasan Hutan

Perubahan kawasan hutan adalah berubahnya luas kawasan hutan sebagai akibat dari adanya pelepasan kawasan hutan (untuk keperluan non kehutanan), tukar-menukar kawasan atau adanya perubahan fungsi hutan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan lahan untuk kegiatan pembangunan, Dinas Kehutanan telah memberikan ijin prinsip yang prosesnya telah berada pada Kementerian

Kehutanan yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ijin pinjam pakai dan konversi kawasan hutan. Perkembangan persetujuan prinsip ijin pinjam pakai kawasan hutan sampai dengan Desember tahun 2010 untuk kepentingan pembangunan menara repiter jaringan telekomunikasi, jalur transportasi darat, dan pertambangan belum ada yang terealisasi. Data penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan (pertambangan dan non pertambangan) diuraikan pada **Tabel 8**.

**Tabel 8.** Data perkembangan penggunaan kawasan hutan tahun 2010

No	Kabupaten/Kota	Jenis Penggunaan						Keterangan
		Pertambangan		Non Pertambangan		Jumlah		
		Jumlah	Luas	Jumlah	Luas	Jumlah	Luas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kota Palu	0	0	0	0	0	0	
2	Kabupaten Donggala							
	- Pembangunan Menara Telkom	0	0	1	0.1087	1	0.1087	Eksplorasi
	- PT. Cahaya Manunggal Abadi	1	3.038	0	0	1	3.038	
3	Kabupaten Sigi							
4	Kabupaten Parigi Moutong							
	- Pembangunan Menara Telkom	0	0	1	0.12	1	0.12	
	- Pembangunan SUTET 70 KV Tawaeli - Parigi an. PT. PLN	0	0	1	43.02	1	43.02	
5	Kabupaten Poso							
	- Pembangunan SUTET PLTA 275 KV PT. Poso Energi	0	0	1	64.51	1	64.51	
6	Kabupaten Tojo Unauna							
	- Pembangunan Jalan Dataran Bulan - Uwematopa	0	0	1	96.08	1	96.08	
7	Kabupaten Banggai							
	- Pembangunan Jalan Umum Soho- Tontouan	0	0	1	1.08	1	1.08	Eksplorasi
	- PT. Billy Indonesia	1	2.277	0	0	1	2.277	
8	Kabupaten Banggai Kepulauan	0	0	0	0	0	0	
9	Kabupaten Morowali							
	- Pembangunan Jalan Angkutan Kelapa Sawit	0	0	1	193.35	1	193.35	Eksplorasi
	- PT. Bintang 8 Mineral	1	3.557.74	0	0	1	3.557.74	
	- PT. Artha Bumi Mining	1	9.299	0	0	1	9.299	
	- PT. Heng Jaya Mineralindo	1	5.871	0	0	1	5.871	
	- PT. Bintang 8 Wahana	1	143	0	0	1	143	Eksplorasi
10	Kabupaten Tolitoli							
	- Pembangunan Menara Telkom	0	0	1	1.30	1	1.3	
11	Kabupaten Buol	0	0	0	0	0	0	
<b>Jumlah</b>						<b>14</b>	<b>24,585.31</b>	

Sumber : Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2011

Data perubahan kawasan hutan untuk pertanian atau perkebunan dan transmigrasi diuraikan pada **Tabel 9**.

**Tabel 9.** Luas Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan untuk Pertanian/ Perkebunan dan Transmigrasi di Provinsi Sulawesi Tengah

No	Kabupaten/Kota	Perubahan Peruntukan				Keterangan
		Pertanian/Perkebunan		Transmigrasi		
		Jumlah	Luas Areal (Ha)	Jumlah	Luas Areal (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kota Palu	0	0	0	0	
2	Kab. Donggala	0	0	1	1.930	
3	Kab. Sigi	0	0	0	0	
4	Kab. Parigi Moutong	0	0	0	0	
5	Kab. Poso	0	0	2	1.375	
6	Kab. Tojo Unauna	0	0	3	2.602	
7	Kab. Banggai	2	7.440	4	2.677	
8	Kab. Banggai Kepulauan	0	0	0	0	
9	Kab. Morowali	0	0	6	13.779	
10	Kab. Tolitoli	0	0	0	0	
11	Kab. Buol	0	0	5	8.145	
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>7.440</b>	<b>21</b>	<b>30.508</b>	

Sumber : Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2011

## G. Kondisi Biologi

Sulawesi Tengah sebagai bagian dari Pulau Sulawesi terletak di antara garis *Wallace* dan *Weber* yang merupakan zona perbatasan Asia Oceania, dengan jenis flora dan fauna Oceania (Australia hingga Papua dan Pulau Timor). Posisi Pulau Sulawesi dari aspek keanekaragaman hayati (*biodiversity*) sangat khas. Adapun tingkat endemisitas yang tinggi terdapat pada kelompok mamalia dari 114 jenis ada 60% (53 jenis) adalah endemik, dari kelompok aves 380 jenis dimana 25% atau (96 jenis) diantaranya adalah endemik, dari kelompok serangga khususnya kupu-kupu Sulawesi memiliki 560 jenis sekitar 42% (235 jenis) adalah endemik, sedangkan kelompok reptilia tercatat 46 jenis Kadal Sulawesi dimana 39% (18 jenis) diantaranya adalah endemik<sup>1</sup>. Sedangkan dari aspek floranya, beberapa jenis tumbuhan liar yang masuk dalam Appendix CITES II yang sudah dimanfaatkan dalam bentuk perdagangan pada tahun 2010, meliputi Gaharu

<sup>1</sup> Marthen T.L. dkk, "Fauna Endemik Sulawesi: Permasalahan dan Usaha Konsevasi", 2003

(*Gyrodontia* sp.), Pakis (*Cyathea contaminans*), dan beberapa jenis karang (*Anthozoa*).

## H. Kondisi Fisik

Garis katulistiwa yang melintasi semenanjung bagian utara membuat iklim di wilayah Sulawesi Tengah termasuk iklim tropis. Musim hujan terjadi antara Bulan April sampai dengan Bulan September, sedangkan musim kemarau antara Bulan Oktober sampai dengan Bulan Maret. Rata-rata curah hujan berkisar antara 800 - 3.000 milimeter per tahun dan termasuk kategori curah hujan terendah di Indonesia. Temperatur berkisar antara 25° - 31°C untuk dataran dan pantai, sedangkan daerah pegunungan dapat mencapai 16° - 22°C dengan tingkat kelembaban antara 71% - 76%.

Secara fisiografis wilayah Sulawesi Tengah umumnya merupakan Kawasan Fisiografis Pegunungan (*mountain region*). Kawasan fisiografis ini dicirikan oleh bentuk topografi mulai dari bergelombang (*rolling*), berbukit (*hilly*) sampai bergunung (*mountainous*). Adapun kondisi ketinggian tempat: 0 - 100 m (20,2%), 100 - 500 m (27,2%), 500 - 1.000 m (26,7%), dan 1.001 ke atas (25,9%) dengan kelerengan sebagai berikut :

1. Datar (0 - 8%) : 778.978 Km<sup>2</sup>
2. Landai (8 - 15%) : 812.334 Km<sup>2</sup>
3. Agak curam (15 - 25%) : 1.238.299 Km<sup>2</sup>
4. Curam (25 - 45%) : 3.806.477 Km<sup>2</sup>

Kondisi topografi umumnya didominasi daerah perbukitan yang sempit dan jurang terjal sehingga secara alami mudah rusak, apalagi kalau tutupan vegetasinya terganggu. Faktor fisiografi ini perlu menjadi pertimbangan khusus dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kondisi geologi terdiri dari: batuan sedimen neogen (792.512 Ha), batuan sedimen miosen bawah (26.663 Ha), sedimen pra tersier tak dibedakan (159.893 Ha), sedimen meozakum tak dibedakan (348.314 Ha), sedimen sekis hamlur (314.191 Ha), sedimen tidak dirinci (65.425, 14 Ha), vulkanis sekarang (4.969 Ha), vulkanis basa menengah (161.551 Ha), ploton berasam kersik (69.384 Ha), dan ploton basah (703.681 Ha).

Jenis tanah terdiri dari Entisol (7.660,774 Ha), Histosols (584,635 Ha), Inceptisols (36.563,538 Ha), Alfisols (428,803 Ha), Alvisols (9.200,001 Ha), Oxisols (243,909 Ha), dan Mollisols (5.681,600 Ha).

## **I. Kondisi Demografis**

Secara demografis hasil sensus penduduk tahun 2010<sup>2</sup>, menggambarkan bahwa jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebanyak 2.633.420 orang, yang terdiri dari 1.349.225 laki-laki dan 1.284.195 perempuan, sehingga rata-rata kepadatan penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah adalah 39 jiwa/km<sup>2</sup>.

Pertanian merupakan sumber mata pencaharian penduduk dengan padi sebagai tanaman utama. Kopi, Kelapa, Kakao, dan Cengkeh merupakan tanaman perdagangan unggulan Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil hutan berupa rotan dan beberapa jenis kayu seperti Agatis, Ebony, dan Meranti.

Penduduk asli Sulawesi Tengah terdiri atas 15 kelompok etnis atau suku yaitu Etnis Kaili, Etnis Kulawi, Etnis Lore, Etnis Pamona, Etnis Mori, Etnis Bungku, Etnis Saluan atau Loinang, Etnis Balantak, Etnis Mamasa, Etnis Taa, Etnis Bare'e, Etnis Banggai, Etnis Buol, Etnis Tolitoli, dan Etnis Tomini. Hasil pemetaan Barbara F. Grimes (1996) menunjukkan aspek ethnologi terdapat 30 bahasa utama dengan 67 varian dialek yang digunakan oleh 928.200 orang sebagai bahasa ibu di Sulawesi Tengah.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Booklet* Hasil Sensus Penduduk 2010 Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, 2010

<sup>3</sup> Grimes, Barbara F (Editor), 1996. *Part of the Ethnologue in Indonesia: Sulawesi. 13<sup>th</sup> Edition*, Summer Institute of Linguistics, Inc. Dallas, USA.

## BAB III METODOLOGI

### A. Lokasi dan Waktu

Kegiatan Pengumpulan data/informasi/peta dilaksanakan di 10 kabupaten dan 1 kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Tata waktu pelaksanaan pengumpulan data diuraikan pada **Tabel 10** di bawah ini.

**Tabel 10.** Tata Waktu (*time schedule*) pengumpulan data/informasi/peta dalam rangka penentuan kabupaten/kota prioritas lokasi *Demonstration Activities* (DA) REDD+ di Sulawesi Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Tata Waktu		Keterangan
		Alokasi	Pelaksanaan	
1.	Palu & Sigi	9 Hari	2 s/d 10 Desember 2011	
2.	Donggala	9 Hari	2 s/d 10 Desember 2011	
3.	Parigi Moutang	9 Hari	2 s/d 10 Desember 2011	
4.	Pasa	9 Hari	2 s/d 10 Desember 2011	
5.	Tojo Una Una	10 Hari	2 s/d 11 Desember 2011	
6.	Morowali	10 Hari	2 s/d 11 Desember 2011	
7.	Tolitoli	10 Hari	2 s/d 11 Desember 2011	
8.	Buol	10 Hari	2 s/d 11 Desember 2011	
9.	Banggai	10 Hari	2 s/d 11 Desember 2011	
10.	Banggai Kepulauan	11 Hari	2 s/d 12 Desember 2011	

Sumber : Kelompok Kerja REDD+ Sulawesi Tengah, Tahun 2011

### B. Peralatan dan Objek Kajian

Peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan data/informasi/peta terdiri dari ; dokumen panduan wawancara semi terstruktur, perekam audio, alat tulis, dan kamera digital. Obyek kajian adalah 11 kabupaten/kota dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

### C. Metode/Teknik

#### 1. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Data/Informasi/Peta yang dikumpulkan untuk penentuan kabupaten/kota prioritas lokasi *Demonstration Activities* (DA) mencakup ; dukungan pemerintah daerah, demografi dan biofisik sumber daya hutan dari

kabupaten/kota yang dinilai tingkat keprioritasannya di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Tiap kriteria yang diukur diuraikan lebih lanjut dalam indikator yang dituangkan dalam bentuk data isian yang diukur di lapangan.

Metode/teknik yang digunakan dalam pengumpulan data di lapangan, disesuaikan dengan jenis data/informasi/peta yang akan dikumpulkan, yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data diuraikan sebagai berikut :

**a. Pengumpulan Data Primer**

Data primer dikumpulkan dari masyarakat langsung di lapangan, instansi terkait di tingkat provinsi dan kabupaten, LSM, badan usaha daerah, dan swasta, Litbang, perguruan tinggi, *analisis spatial*, wawancara, pengamatan, diskusi, dan verifikasi lapangan terhadap data yang telah dikumpulkan.

**b. Pengumpulan Data Sekunder**

Data sekunder yang dikumpulkan merupakan data yang terkait dan pendukung untuk keperluan analisa penetapan kabupaten/kota prioritas. Pengumpulan data dilakukan melalui : data statistik, studi literatur atau kajian pustaka, peraturan perundangan, majalah atau media lain dan kajian terhadap laporan-laporan yang terkait.

**2. Pengukuran Nilai Kriteria dan Indikator**

Penentuan kabupaten/kota prioritas dilakukan melalui pengukuran nilai indikator dari tiap kriteria. Aspek penilaian mencakup kriteria : Dukungan Pemerintah Daerah, Kondisi Demografi, dan Kondisi Biofisik Sumber Daya Hutan. Tiap kriteria diukur dalam bentuk nilai indikator sesuai standarnya.

Penetapan kabupaten/kota prioritas dilakukan melalui tahapan : penetapan kriteria dan indikator, penetapan nilai, pengumpulan data/informasi/peta, pengolahan data dan penetapan nilai prioritas ; serta penetapan kabupaten/kota prioritas lokasi *Demonstration Activities* (DA).

Dalam penetapan kabupaten/kota prioritas, kriteria yang dipilih untuk menentukan tingkat prioritas kabupaten/kota mencakup kriteria Dukungan Pemerintah Daerah, Demografi, dan Biofisik Sumber Daya Hutan. Dari tiap kriteria ditetapkan beberapa indikator yang dapat diukur dalam besaran kuantitatif maupun kualitatif dan dinyatakan sebagai standar. Ukuran dalam standar selanjutnya diberi nilai, dimana besarnya nilai tersebut mencerminkan ranking dari fakta kondisi atau keadaan indikator di lapangan. Semakin tinggi nilai (skor) menunjukkan makin tingginya tingkat prioritas kabupaten/kota untuk dapat ditetapkan sebagai kabupaten/kota prioritas.

**a. Kriteria Dukungan Pemerintah Daerah**

Kriteria Dukungan Pemerintah Daerah adalah aspek yang mengukur seberapa besar respon atau dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota terhadap Program REDD+ yang akan diimplementasikan. Parameter Dukungan Pemerintah Daerah mempunyai bobot sebesar 25% dalam penentuan kabupaten/kota prioritas mengingat pentingnya dukungan atau komitmen dari Pemerintah Daerah terhadap berhasil atau tidaknya implementasi REDD+. Besaran Dukungan Pemerintah Daerah meliputi 4 (empat) indikator sebagai berikut :

**1) Distribusi Alokasi Anggaran Pembangunan**

Distribusi Alokasi Anggaran Pembangunan adalah perbandingan antara jumlah atau volume anggaran pembangunan yang dialokasikan untuk kegiatan pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat adat, lokal, dan lingkungan terhadap total anggaran pembangunan daerah yang diperoleh dari tiap kabupaten/kota yang diukur dalam satu tahun yang dinyatakan dalam satuan prosentase.

Distribusi Alokasi Anggaran Pembangunan di kelompokkan dalam 3 (tiga) kategori skor yakni ; tinggi, sedang, dan rendah.



Semakin besar prosentase alokasi anggaran pembangunan yang dialokasikan untuk kegiatan pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat adat, lokal, dan lingkungan terhadap total anggaran pembangunan daerah, maka semakin prioritas untuk ditetapkan sebagai kabupaten/kota terpilih.

## **2) Organisasi atau Lembaga Pengurus Hutan**

Organisasi atau Lembaga Pengurus Hutan dimaksud diukur dari keberadaan, kemandirian, dan keefektifannya. Organisasi atau Lembaga Pengurus Hutan di kelompokkan dalam 3 (tiga) kategori skor yakni : tinggi, sedang, dan rendah.

Efektifnya organisasi/lembaga pengurus hutan ditunjukkan dari nilai kinerjanya. Semakin tinggi nilai kinerjanya, maka semakin prioritas untuk ditetapkan sebagai kabupaten/kota terpilih.

## **3) Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat**

Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dimaksud diukur dari keberadaan dan keefektifannya. Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat di kelompokkan dalam 3 (tiga) kategori skor yakni : tinggi, sedang, dan rendah.

Efektifnya kerjasama pemerintah dengan masyarakat ditunjukkan dengan adanya bukti yang nyata dari kerjasama yang telah dilaksanakan, Semakin terbuktinya realisasi kerjasama, maka semakin prioritas untuk ditetapkan sebagai kabupaten/kota terpilih.

## **4) Kerjasama Swasta/NGO dengan Masyarakat**

Kerjasama swasta/NGO dengan masyarakat diukur dari keberadaan dan keefektifannya. Kerjasama swasta/NGO dengan masyarakat di kelompokkan dalam 3 (tiga) kategori skor yakni : tinggi, sedang, dan rendah.

Efektifnya kerjasama swasta/NGO dengan masyarakat ditunjukkan dengan adanya bukti yang nyata dari kerjasama yang telah dilaksanakan, Semakin terbuktinya realisasi kerjasama, maka semakin prioritas untuk ditetapkan sebagai kabupaten/kota terpilih.

**b. Kriteria Demografi**

Dipilihnya aspek demografi sebagai salah satu kriteria dalam penentuan kabupaten/kota prioritas lokasi *Demonstration Activities* (DA) merupakan wujud keberpihakan kepada masyarakat dalam implementasi program REDD+. Parameter demografi mempunyai bobot sebesar 20% dalam penentuan kabupaten/kota prioritas. Besaran demografi meliputi 3 (tiga) indikator sebagai berikut :

**1) Jumlah Desa**

Jumlah Desa dimaksud adalah jumlah desa yang berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Jumlah desa di kelompokkan dalam 3 (tiga) kategori skor yakni : tinggi, sedang, dan rendah.

Semakin banyak jumlah desa yang berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan, semakin prioritas untuk ditetapkan sebagai kabupaten/kota terpilih.

**2) Kepadatan Penduduk**

Kepadatan Penduduk dimaksud adalah prosentase jumlah penduduk terhadap luasnya dari desa-desa yang berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Kepadatan penduduk di kelompokkan dalam 3 (tiga) kategori skor yakni : tinggi, sedang, dan rendah.

Semakin tinggi prosentasenya, maka semakin prioritas untuk ditetapkan sebagai kabupaten/kota terpilih.

### **3) Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia dimaksud adalah jumlah sumber daya manusia berkualifikasi kehutanan yang tersedia atau dimiliki oleh kabupaten/kota. Sumber Daya Manusia di kelompokkan dalam 3 (tiga) kategori skor yakni ; tinggi, sedang, dan rendah.

Semakin banyak jumlah SDM berkualifikasi kehutanan yang dimiliki, semakin prioritas untuk ditetapkan sebagai kabupaten/kota terpilih.

#### **c. Kriteria Biofisik Sumber Daya Hutan**

Kriteria Biofisik Sumber Daya Hutan merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan kabupaten/kota prioritas *Demonstration Activities* (DA) dan merupakan kriteria utama yang dipergunakan dalam menentukan tingkat prioritas kabupaten/kota. Parameter Biofisik Sumber Daya Hutan mempunyai bobot sebesar 55% dalam penentuan kabupaten/kota prioritas. Besaran Biofisik Sumber Daya Hutan meliputi 5 (lima) indikator sebagai berikut :

##### **1) Stok Karbon**

Stok karbon dimaksud adalah jumlah kandungan karbon yang dimiliki kabupaten/kota yang diperoleh berdasarkan analisis spasial. Stok karbon di kelompokkan dalam 3 (tiga) kategori skor yakni : tinggi, sedang, dan rendah.

Semakin sedikit jumlah stock karbon, menunjukkan stok karbon yang dimiliki perlu ditingkatkan sehingga memperoleh prioritas untuk ditetapkan sebagai kabupaten/kota terpilih.

##### **2) Luas Lahan Kritis**

Luas Lahan Kritis dimaksud adalah prosentase luas lahan kritis terhadap luas kawasan hutan dalam wilayah kabupaten/kota yang diperoleh berdasarkan analisis spasial. Luas lahan kritis di kelompokkan dalam 3 (tiga) kategori skor yakni : tinggi, sedang, dan rendah.

Semakin besar prosentase luas lahan kritis terhadap luas wilayah kabupaten/kota, menunjukkan luas lahan kritis dalam wilayah kabupaten/kota semakin prioritas untuk direhabilitasi sehingga memperoleh prioritas untuk ditetapkan sebagai kabupaten/kota terpilih.

### **3) Luas Kawasan Hutan**

Luas kawasan hutan dimaksud adalah prosentase luas kawasan hutan terhadap luas wilayah kabupaten/kota yang diperoleh berdasarkan analisis spasial. Luas kawasan hutan di kelompokkan dalam 3 (tiga) kategori skor yakni : tinggi, sedang, dan rendah.

Semakin besar prosentase luas kawasan hutan terhadap luas wilayah kabupaten/kota, maka semakin prioritas untuk ditetapkan sebagai kabupaten/kota terpilih.

### **4) Penutupan Lahan Hutan**

Penutupan lahan hutan dimaksud adalah prosentase penutupan lahan hutan dalam wilayah kabupaten/kota yang diperoleh berdasarkan analisis spasial. Penutupan lahan hutan di kelompokkan dalam 3 (tiga) kategori skor yakni : tinggi, sedang, dan rendah.

Semakin kecil prosentase luas areal berhutan terhadap luas wilayah kabupaten/kota, menunjukkan penutupan lahan hutan yang dimiliki perlu ditingkatkan sehingga memperoleh prioritas untuk ditetapkan sebagai kabupaten/kota terpilih.

### **5) Pengelolaan Kawasan Hutan**

Pengelolaan Kawasan Hutan dimaksud adalah prosentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh Organisasi Pengelola Hutan dan/ atau oleh Pemegang Perizinan yang Sah di Bidang Kehutanan terhadap luas total kawasan hutan wilayah kabupaten/kota. Pengelolaan kawasan hutan di kelompokkan dalam 3 (tiga) kategori skor yakni : tinggi, sedang, dan rendah.

Semakin besar prosentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh Organisasi Pengelola Hutan dan/ atau oleh Pemegang Perizinan yang Sah di Bidang Kehutanan terhadap luas total kawasan hutan wilayah kabupaten/kota, menunjukkan pengelolaan kawasan hutan telah berjalan dengan efektif sehingga memperoleh prioritas untuk ditetapkan sebagai kabupaten/kota terpilih.

Kriteria, indikator, dan bobot dalam penentuan kabupaten/kota prioritas lokasi *Demonstration Activities* (DA) Provinsi Sulawesi Tengah diuraikan pada **Tabel 11** di bawah ini.

**Tabel 11.** Kriteria, indikator, dan pembobotan penentuan kabupaten/kota prioritas DA REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah.

No.	Kriteria	Indikator	Bobot
1.	Dukungan Pemerintah Daerah	1. Distribusi Alokasi Anggaran Pembangunan 2. Organisasi/Lembaga Pengelola Hutan 3. Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat 4. Kerjasama Swasta/NGO dengan Masyarakat	25%
2.	Demografi	1. Jumlah Desa 2. Kepadatan Penduduk 3. Sumberdaya Manusia (SDM)	20%
3.	Biofisik Sumberdaya Hutan	1. Stock Karbon 2. Luas Lahan Kritis 3. Luas Kawasan Hutan 4. Penutupan Lahan Hutan 5. Pengelolaan Kawasan Hutan	55%

Sumber : Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 40 tahun 2011

### 3. Pembobotan

Penentuan kabupaten/kota prioritas lokasi *Demonstration Activities* (DA) ditentukan oleh 3 (tiga) kriteria, dimana tiap kriteria memiliki bobot yang berbeda dan besarnya bobot menunjukkan tingkat peran suatu kriteria dibanding kriteria yang lain dalam menentukan kabupaten/kota prioritas lokasi *Demonstration Activities* (DA) yang sedang dinilai atau dipilih.

Penentuan nilai penting diukur dengan pemberian bobot yang dinyatakan dalam angka persentase peran. Makin tinggi nilai bobot menunjukkan kriteria makin penting peranannya dalam menentukan tingkat

kabupaten/kota prioritas dan sebaliknya. Sesuai tingkat perannya kriteria biofisik sumber daya hutan ditetapkan memiliki bobot 55%, dukungan pemerintah daerah 25%, dan demografi 20%, sehingga total jumlah bobot adalah 100%.

Kriteria biofisik sumber daya hutan memiliki bobot paling besar, yaitu 55%, karena penyelenggaraan *Demonstration Activities* (DA) adalah merupakan kegiatan fisik yang memerlukan kelayakan atau kesesuaian fisik lapangan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dukungan pemerintah daerah memiliki bobot kedua terbesar, yaitu 25%, karena penyelenggaraan *Demonstration Activities* (DA) REDD+ adalah merupakan program baru yang masih memerlukan pembenahan-pembenahan sehingga diperlukan dukungan dari seluruh *stakeholders* yang berada di kabupaten/kota.

#### **4. Pengolahan Data dan Analisis**

Pengolahan data dan analisis dilakukan dengan menggunakan metoda statistik non parametrik (*description scoring*). Data disusun dalam tabulasi dari tiap kabupaten untuk tiap indikator yang dievaluasi, selanjutnya pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kuantifikasi data pengukuran tiap indikator untuk tiap kriteria dalam data kategorik dan dinyatakan dalam 3 (tiga) selang nilai. Nilai 3 mencerminkan nilai katagori tinggi, 2 menunjukkan nilai katagori sedang dan nilai 1 menunjukkan katagori rendah dalam menentukan tingkat keprioritasan.
- b. Skoring yakni pemberian nilai tiap indikator dengan nilai 3, 2 dan 1 sesuai dengan ukuran standar yang ditetapkan.
- c. Penghitungan Nilai Indikator Tertimbang (NIT) :

NIT suatu kriteria (NIT<sub>k</sub>) adalah hasil bagi antara bobot suatu kriteria (B<sub>k</sub>) dengan jumlah indikator pada kriteria tersebut (J<sub>Ik</sub>) dikali dengan jumlah hasil pembagian antara nilai indikator dengan nilai indikator maksimal (dalam hal ini 3) yang ada dalam kriteria bersangkutan. Secara matematis, perhitungan dilakukan dengan rumusan berikut:

$$NIT_k = \frac{Bk}{Jlk} \left( \sum_{i=1}^n \frac{Ni}{Ni_{max}} \right)$$

Dimana :

- NIT : Nilai Indikator Tertimbang  
 k : Kriteria penentuan prioritas ( 1 ... 5)  
 n : Jumlah indikator dalam tiap kriteria  
 Ni : Nilai indikator tiap kriteria  
 Bk : Besarnya nilai Bobot dari kriteria ke k  
 Ni max : Nilai indikator terbesar, dalam hal ini 3  
 Jlk : Jumlah indikator untuk kriteria ke-k

- d. Perhitungan Total Nilai Prioritas (TNP) suatu kabupaten/kota dilakukan dengan menjumlahkan semua nilai indikator tertimbang dari semua kriteria.

TNP : NIT Dukungan Pemerintah Daerah + NIT Demografi + NIT Biofisik Sumber Daya Hutan.

## 5. Penentuan Kabupaten/Kota Prioritas Lokasi DA REDD+

Penentuan kabupaten/kota prioritas lokasi *Demonstration Activities* (DA) REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data lapangan, dengan besarnya skor Total Nilai Prioritas (TNP) sebagai berikut :

1. Kabupaten/kota Prioritas 1  
Adalah kabupaten/kota yang memiliki nilai TNP > 60,90
2. Kabupaten/kota Prioritas 2  
Adalah kabupaten/kota yang memiliki nilai TNP 53,00 s/d 60,90
3. Kabupaten/kota Prioritas 3  
Adalah kabupaten/kota yang memiliki nilai TNP < 53,00

## BAB IV DATA/INFORMASI/PETA

Data/informasi/peta yang dikumpulkan adalah data/informasi/peta sesuai Kriteria dan Indikator yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Indikator Penentuan Lokasi *Demonstration Activities (DA) Reducing Emmission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)* Provinsi Sulawesi Tengah.

### A. Dukungan Pemerintah Daerah

#### 1. Distribusi Alokasi Anggaran Pembangunan

Prosentase jumlah atau volume anggaran pembangunan yang dialokasikan untuk kegiatan pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat adat, lokal, dan lingkungan terhadap jumlah total anggaran pembangunan daerah yang diperoleh dari tiap kabupaten/kota pada tahun 2011 diuraikan pada **Tabel 12**.

**Tabel 12.** Prosentase jumlah APBD yang dialokasikan untuk pembangunan kehutanan terhadap jumlah total APBD kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah tahun 2011.

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah APBD Tahun 2011 (Rupiah)		Prosentase
		Yang dialokasikan pada Bid. Kehutanan	Total	
1.	Palu	273.540.000	764.037.922.020	0,04
2.	Sigi	3.028.020.000	509.916.720.009	0,59
3.	Donggala	9.301.168.714	712.230.181.377,55	1,31
4.	Parigi Moutong	1.359.000.000	417.396.015.363	0,33
5.	Poso	2.692.724.268	799.218.080.406	0,34
6.	Morowali	784.960.800	666.674.470.640,11	0,12
7.	Tojo Una Una	2.699.116.136	507.051.988.925	0,53
8.	Banggai	6.009.553.900	232.926.145.225	2,58
9.	Tolitoli	5.511.144.511	490.835.963.165	1,12
10.	Buol	3.936.829.458	590.000.000.000	0,67
11.	Banggai Kepulauan	3.454.708.800	203.616.715.598	1,70

Sumber : Data Primer Hasil Pengumpulan Data/Informasi/Peta



## 2. Organisasi/Lembaga Pengelola Hutan

Organisasi atau Lembaga Pengurus Hutan di kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah yang meliputi keberadaan, kemandirian, dan keefektifannya (sesuai Nilai Kinerja) diuraikan pada **Tabel 13**.

**Tabel 13.** Organisasi/Lembaga Pengelola Hutan di kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Organisasi/Lembaga Pengelola Hutan	Nilai Kinerja
1.	Palu	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan	87,50%
2.	Sigi	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	95,83%
3.	Donggala	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	100,00%
4.	Parigi Moutong	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	100,00%
5.	Poso	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	98,82%
6.	Morowali	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	70,20%
7.	Tojo Una Una	Dinas Kehutanan	92,24%
8.	Banggai	Dinas Kehutanan	95,87%
9.	Tolitoli	Dinas Kehutanan	87,76%
10.	Buol	Dinas Kehutanan	99,47%
11.	Banggai Kepulauan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	100,00%

Sumber : Data Primer Hasil Pengumpulan Data/Informasi/Peta

## 3. Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat

Keberadaan dan keefektifan kerjasama antara pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah dengan masyarakat yang dibuktikan dengan realisasi kerjasama dalam pengelolaan hutan diuraikan pada **Tabel 14**.

**Tabel 14.** Kerjasama Pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan di kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Keberadaan	Bentuk Realisasi Kerjasama
1.	Palu	Tidak Ada	-
2.	Sigi	Ada	Pengelolaan Kawasan TN. Lore Lindu
3.	Donggala	Ada	Pengelolaan Hutan Lindung Ganti
4.	Parigi Moutong	Ada	-
5.	Poso	Tidak Ada	-
6.	Morowali	Tidak Ada	-
7.	Tojo Una Una	Ada	Pengelolaan Kawasan Lindung Sansarino
8.	Banggai	Tidak Ada	-
9.	Tolitoli	Ada	-
10.	Buol	Tidak Ada	-
11.	Banggai Kepulauan	Tidak Ada	-

Sumber : Data Primer Hasil Pengumpulan Data/Informasi/Peta

#### 4. Kerjasama Swasta/NGO dengan Masyarakat

Keberadaan dan keefektifan kerjasama antara Swasta/NGO se-Sulawesi Tengah dengan masyarakat yang dibuktikan dengan realisasi kerjasama dalam pengelolaan hutan diuraikan pada **Tabel 15**.

**Tabel 15.** Kerjasama Swasta/NGO dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan di kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Keberadaan	Bentuk Realisasi Kerjasama
1.	Palu	Tidak Ada	-
2.	Sigi	Ada	Pengelolaan TN. Lore Lindu
3.	Donggala	Tidak Ada	-
4.	Parigi Moutong	Tidak Ada	-
5.	Poso	Tidak Ada	-
6.	Morowali	Tidak Ada	-
7.	Tojo Una Una	Tidak Ada	-
8.	Banggai	Tidak Ada	-
9.	Tolitoli	Tidak Ada	-
10.	Buol	Tidak Ada	-
11.	Banggai Kepulauan	Tidak Ada	-

Sumber : Data Primer Hasil Pengumpulan Data/Informasi/Peta

### B. Demografi

#### 1. Jumlah Desa

Jumlah desa/kelurahan yang berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan di kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah diuraikan pada **Tabel 16**.

**Tabel 16.** Jumlah desa yang berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan di kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Berada di Dalam dan/atau Berbatasan Langsung dengan Kawasan Hutan (Desa)
1.	Palu	1
2.	Sigi	37
3.	Donggala	15
4.	Parigi Moutong	22
5.	Poso	35
6.	Morowali	52
7.	Tojo Una Una	36
8.	Banggai	17
9.	Tolitoli	10
10.	Buol	16
11.	Banggai Kepulauan	21

Sumber : Data Primer Hasil Pengumpulan Data/Informasi/Peta

## 2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk yang dimaksud adalah perbandingan antara jumlah penduduk dan luas wilayah desa-desa yang berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan diuraikan pada **Tabel 17**.

**Tabel 17.** Kepadatan penduduk desa-desa yang berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan di kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
1.	Palu	1.400	63,41	22,08
2.	Sigi	61.478	1.347,34	45,63
3.	Donggala	20.194	465,56	43,38
4.	Parigi Moutong	39.766	694,05	57,30
5.	Poso	32.186	3.109,86	10,35
6.	Morowali	39.625	3.961,37	10,00
7.	Tojo Una Una	26.500	586,52	45,18
8.	Banggai	43.854	2.635,10	16,64
9.	Tolitoli	17.418	366,35	47,54
10.	Buol	18.470	448,08	41,22
11.	Banggai Kepulauan	18.532	477,58	38,80

Sumber : Data Primer Hasil Pengumpulan Data/Informasi/Peta

## 3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM berlatar belakang ilmu kehutanan termasuk SDM berpendidikan umum yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis kehutanan diuraikan pada **Tabel 18**.

**Tabel 18.** Jumlah SDM berlatar belakang ilmu kehutanan termasuk SDM berpendidikan umum yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis kehutanan di kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Sumberdaya Manusia (Orang)
1.	Palu	18
2.	Sigi	33
3.	Donggala	36
4.	Parigi Moutong	56
5.	Poso	36
6.	Morowali	20
7.	Tojo Una Una	36
8.	Banggai	38
9.	Tolitoli	62
10.	Buol	25
11.	Banggai Kepulauan	16

Sumber : Data Primer Hasil Pengumpulan Data/Informasi/Peta

## C. Biofisik Sumber Daya Hutan

### 1. Stock Karbon

Stock karbon vegetasi yang tersimpan dalam wilayah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah berdasarkan hasil analisis spasial diuraikan pada **Tabel 19**.

**Tabel 19.** Data stock karbon yang tersimpan dalam wilayah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah berdasarkan hasil analisis spasial

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Total Stock Karbon (Ton)	Luas Wilayah (Ha)	Stock Karbon (Ton/Ha)
1.	Palu	5.634.922,70	41.176,25	136,85
2.	Sigi	130.623.097,41	509.015,37	256,62
3.	Donggala	107.050.579,48	495.714,75	215,95
4.	Parigi Moutong	132.188.559,95	584.711,98	226,07
5.	Poso	163.233.667,96	723.677,91	225,56
6.	Morowali	342.611.086,41	1.290.535,73	265,48
7.	Tojo Una Una	107.457.903,56	528.567,31	203,30
8.	Banggai	185.694.495,22	841.556,43	220,66
9.	Tolitoli	75.850.928,35	356.554,44	212,73
10.	Buol	102.211.119,92	378.812,61	269,82
11.	Banggai Kepulauan	51.237.549,92	295.937,04	173,14

Sumber : Data Primer Hasil Analisis Spasial

### 2. Luas Lahan Kritis

Perbandingan antara luas lahan kritis dan luas total kawasan hutan dalam wilayah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah diuraikan pada **Tabel 20**.

**Tabel 20.** Perbandingan antara luas lahan kritis dan luas total kawasan hutan dalam wilayah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah berdasarkan hasil analisis spasial

No.	Kabupaten/Kota	Luas Lahan Kritis (Ha)	Luas Kawasan Hutan (Ha)	Prosentase (%)
1.	Palu	10.233,36	19.006,21	53,84
2.	Sigi	118.571,23	388.607,93	30,51
3.	Donggala	110.951,90	312.261,99	35,53
4.	Parigi Moutong	141.525,43	364.720,75	38,80
5.	Poso	152.631,80	484.870,12	31,48
6.	Morowali	240.686,06	977.186,01	24,63
7.	Tojo Una Una	107.024,93	378.533,04	28,27
8.	Banggai	174.142,45	564.971,36	30,82
9.	Tolitoli	71.462,24	207.356,96	34,46
10.	Buol	86.470,14	244.757,79	35,33
11.	Banggai Kepulauan	49.567,94	134.888,38	36,75

Sumber : Data Primer Hasil Analisis Spasial

### 3. Luas Kawasan Hutan.

Perbandingan luas kawasan hutan dan luas total wilayah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah diuraikan pada **Tabel 21**.

**Tabel 21.** Perbandingan luas kawasan hutan dan luas total wilayah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah berdasarkan hasil analisis spasial

No.	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Hutan (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Prosentase (%)
1.	Palu	19.006,21	41.578,87	45,71
2.	Sigi	388.607,93	509.691,51	76,24
3.	Donggala	312.261,99	499.848,45	62,47
4.	Parigi Moutong	364.720,75	588.157,06	62,01
5.	Poso	484.870,12	725.370,63	66,84
6.	Morowali	977.186,01	1.306.278,52	74,81
7.	Tojo Una Una	378.533,04	534.029,20	70,88
8.	Banggai	564.971,36	848.135,51	66,61
9.	Tolitoli	207.356,96	358.255,46	57,88
10.	Buol	244.757,79	380.764,11	64,28
11.	Banggai Kepulauan	134.888,38	312.546,72	43,16

Sumber : Data Primer Hasil Analisis Spasial

### 4. Penutupan Lahan Hutan

Perbandingan luas penutupan lahan dan luas total wilayah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah diuraikan pada **Tabel 22**.

**Tabel 22.** Perbandingan luas penutupan lahan dan luas total kawasan hutan di wilayah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah berdasarkan hasil analisis spasial

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Berhutan (Ha)	Total Luas Wilayah (Ha)	Prosentase (%)
1.	Palu	23.650,53	41.578,87	56,88
2.	Sigi	400.871,02	509.691,51	78,65
3.	Donggala	378.789,29	499.848,45	75,78
4.	Parigi Moutong	410.172,93	588.157,06	69,74
5.	Poso	559.954,89	725.370,63	77,20
6.	Morowali	992.342,99	1.306.278,52	75,97
7.	Tojo Una Una	382.325,61	534.029,20	71,59
8.	Banggai	571.177,90	848.135,51	67,35
9.	Tolitoli	244.972,05	358.255,46	68,38
10.	Buol	289.992,42	380.764,11	76,16
11.	Banggai Kepulauan	207.364,52	312.546,72	66,35

Sumber : Data Primer Hasil Analisis Spasial

## 5. Pengelolaan Kawasan Hutan

Perbandingan luas kawasan hutan yang dikelola oleh organisasi pengelola hutan dan/atau pemegang perizinan yang sah di bidang kehutanan terhadap luas total kawasan hutan di wilayah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah diuraikan pada **Tabel 23**.

**Tabel 23.** Luas kawasan hutan yang dikelola oleh organisasi pengelola hutan dan/atau pemegang perizinan yang sah di bidang kehutanan terhadap luas total kawasan hutan di wilayah kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah berdasarkan hasil analisis spasial

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Berhutan (Ha)	Luas Kawasan Hutan (Ha)	Prosentase (%)
1.	Palu	4.958,21	19.006,21	26,09
2.	Sigi	109.510,52	388.607,93	28,18
3.	Donggala	132.976,24	312.261,99	42,58
4.	Parigi Moutong	45.339,10	364.720,75	12,43
5.	Pasa	156.153,89	484.870,12	32,21
6.	Morowali	59.140,68	977.186,01	6,05
7.	Tojo Una Una	103.914,28	378.533,04	27,45
8.	Banggai	153.552,15	564.971,36	27,18
9.	Tolitoli	31.418,02	207.356,96	15,15
10.	Buol	6.673,68	244.757,79	2,73
11.	Banggai Kepulauan	0,00	134.888,38	0,00

Sumber : Data Primer Hasil Analisis Spasial

## BAB V PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS

### A. Ukuran dan Nilai Indikator

#### 1. Kriteria Dukungan Pemerintah Daerah

Ukuran dan nilai indikator pada kriteria dukungan pemerintah daerah yang dinilai per-kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah diuraikan pada **Tabel 24**.

**Tabel 24.** Ukuran dan nilai masing-masing indikator yang dinilai pada kriteria dukungan pemerintah daerah per-kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.

No.	KABUPATEN/KOTA	UKURAN DAN NILAI MASING-MASING INDIKATOR YANG DINILAI							
		Distribusi Alokasi Anggaran Pembangunan		Organisasi/ Lembaga Pengurus Hutan		Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat		Kerjasama Swasta/ NGO dengan Masyarakat	
		Ukuran	Nilai	Ukuran	Nilai	Ukuran	Nilai	Ukuran	Nilai
1.	Palu	Rendah	1	Tinggi	3	Rendah	1	Rendah	1
2.	Sigi	Rendah	1	Tinggi	3	Tinggi	3	Sedang	2
3.	Donggala	Sedang	2	Tinggi	3	Tinggi	3	Rendah	1
4.	Parigi Moutong	Rendah	1	Tinggi	3	Tinggi	3	Rendah	1
5.	Poso	Rendah	1	Tinggi	3	Rendah	1	Rendah	1
6.	Morowali	Rendah	1	Rendah	1	Rendah	1	Rendah	1
7.	Tojo Una Una	Rendah	1	Tinggi	3	Sedang	2	Rendah	1
8.	Banggai	Tinggi	3	Tinggi	3	Rendah	1	Rendah	1
9.	Tolitoli	Sedang	2	Sedang	2	Sedang	2	Rendah	1
10.	Buol	Rendah	1	Tinggi	3	Rendah	1	Rendah	1
11.	Banggai Kepulauan	Sedang	2	Tinggi	3	Rendah	1	Rendah	1

Sumber : Hasil Pengolahan Data

#### 2. Kriteria Demografi

Ukuran dan nilai indikator pada kriteria demografi yang dinilai per-kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah diuraikan pada **Tabel 25**.

**Tabel 25.** Ukuran dan nilai masing-masing indikator yang dinilai pada kriteria demografi per-kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah.

No.	KABUPATEN/KOTA	UKURAN DAN NILAI MASING-MASING INDIKATOR YANG DINILAI					
		Jumlah Desa		Kepadatan Penduduk		Sumberdaya Manusia (SDM)	
		Ukuran	Nilai	Ukuran	Nilai	Ukuran	Nilai
1.	Palu	Rendah	1	Rendah	1	Rendah	1
2.	Sigi	Tinggi	3	Tinggi	3	Sedang	2

3.	Donggala	Rendah	1	Tinggi	3	Sedang	2
4.	Parigi Moutong	Sedang	2	Tinggi	3	Tinggi	3
5.	Poso	Sedang	2	Rendah	1	Sedang	2
6.	Morowali	Tinggi	3	Rendah	1	Rendah	1
7.	Tojo Una Una	Tinggi	3	Tinggi	3	Sedang	2
8.	Banggai	Rendah	1	Rendah	1	Sedang	2
9.	Tolitoli	Rendah	1	Tinggi	3	Tinggi	3
10.	Buol	Rendah	1	Sedang	2	Rendah	1
11.	Banggai Kepulauan	Sedang	2	Sedang	2	Rendah	1

Sumber : Hasil Pengolahan Data

### 3. Kriteria Biofisik Sumberdaya Hutan

Ukuran dan nilai indikator pada kriteria kondisi biofisik sumberdaya hutan yang dinilai per-kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah diuraikan pada **Tabel 26**.

**Tabel 26.** Ukuran dan nilai masing-masing indikator yang dinilai pada kriteria biofisik sumberdaya hutan per-kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah

No.	KABUPATEN / KOTA	UKURAN DAN NILAI MASING-MASING INDIKATOR YANG DINILAI									
		Stock Karbon		Luas Lahan Kritis		Luas Kawasan Hutan		Penutupan Lahan Hutan		Pengelolaan Kaw. Hutan	
		Ukuran	Nilai	Ukuran	Nilai	Ukuran	Nilai	Ukuran	Nilai	Ukuran	Nilai
1.	Palu	Tinggi	3	Tinggi	3	Rendah	1	Tinggi	3	Sedang	2
2.	Sigi	Rendah	1	Rendah	1	Tinggi	3	Rendah	1	Sedang	2
3.	Donggala	Sedang	2	Sedang	2	Sedang	2	Rendah	1	Tinggi	3
4.	Parigi Moutong	Rendah	1	Sedang	2	Sedang	2	Sedang	2	Rendah	1
5.	Poso	Rendah	1	Rendah	1	Tinggi	3	Rendah	1	Tinggi	3
6.	Morowali	Rendah	1	Rendah	1	Tinggi	3	Rendah	1	Rendah	1
7.	Tojo Una Una	Sedang	2	Rendah	1	Tinggi	3	Rendah	1	Sedang	2
8.	Banggai	Sedang	2	Rendah	1	Tinggi	3	Sedang	2	Sedang	2
9.	Tolitoli	Sedang	2	Sedang	2	Sedang	2	Sedang	2	Sedang	2
10.	Buol	Rendah	1	Sedang	2	Sedang	2	Rendah	1	Rendah	1
11.	Banggai Kepulauan	Tinggi	3	Sedang	2	Rendah	1	Sedang	2	Rendah	1

Sumber : Hasil Pengolahan Data

### B. Rekapitulasi Jumlah Nilai Indikator

Rekapitulasi jumlah nilai indikator pada tiap kriteria yang dinilai per-kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah diuraikan pada **Tabel 27**.



**Tabel 27.** Rekapitulasi jumlah nilai indikator pada tiap kriteria yang dinilai per-kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah

No.	KRITERIA / INDIKATOR	NILAI PER-KABUPATEN/KOTA										
		Palu	Sigi	Donggala	Parimout	Poso	Morowali	Touna	Banggai	Tolitoli	Buol	Bangkep
<b>A.</b>	<b>Dukungan Pemerintah Daerah</b>											
1.	Distribusi Alokasi Anggaran Pembangunan	1	1	2	1	1	1	1	3	2	1	2
2.	Organisasi/Lembaga Pengelola Hutan	3	3	3	3	3	1	3	3	2	3	3
3.	Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat	1	3	3	3	1	1	2	1	2	1	1
4.	Kerjasama Swasta/NGO dengan Masyarakat	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	<b>Jumlah A</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>B.</b>	<b>Demografi</b>											
1.	Jumlah Desa	1	3	1	2	2	3	3	1	1	1	2
2.	Kepadatan Penduduk	1	3	3	3	1	1	3	1	3	2	2
3.	Sumber Daya Manusia	1	2	2	3	2	1	2	2	3	1	1
	<b>Jumlah B</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>C.</b>	<b>Kondisi Biofisik Sumberdaya Hutan</b>											
1.	Stock Karbon	3	1	2	1	1	1	2	2	2	1	3
2.	Luas Lahan Kritis	3	1	2	2	1	1	1	1	2	2	2
3.	Luas Kawasan Hutan	1	3	2	2	3	3	3	3	2	2	1
4.	Penutupan Lahan Hutan	3	1	1	2	1	1	1	2	2	1	2
5.	Pengelolaan Kawasan Hutan	2	2	3	1	3	1	2	2	2	1	1
	<b>Jumlah C</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>9</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data

### C. Nilai Indikator Tertimbang (NIT) dan Total Nilai Prioritas (TNP)

Berdasarkan rekapitulasi jumlah nilai indikator pada tiap kriteria, maka dengan menggunakan rumus yang telah ditetapkan dalam metodologi dapat diperoleh angka/nilai NIT suatu kriteria (NIT<sub>k</sub>) yang merupakan hasil bagi antara bobot suatu kriteria (B<sub>k</sub>) yang telah ditetapkan dengan jumlah indikator pada kriteria tersebut (J<sub>ik</sub>) dikali dengan jumlah hasil pembagian antara nilai indikator dengan nilai indikator maksimal (dalam hal ini 3) yang ada dalam kriteria bersangkutan. Perhitungan Total Nilai Prioritas (TNP) suatu kabupaten/kota dilakukan dengan menjumlahkan semua nilai indikator tertimbang dari semua kriteria.

$$TNP = NIT \text{ Dukungan Pemerintah Daerah} + NIT \text{ Demografi} + NIT \text{ Biofisik Sumber Daya Hutan}$$

Hasil perhitungan Nilai Indikator Tertimbang (NIT) dan Total Nilai Prioritas kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah diuraikan pada **Tabel 28**.

**Tabel 28.** Hasil perhitungan Nilai Indikator Tertimbang (NIT) dan Total Nilai Prioritas (TNP) kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah

No.	URAIAN PER-KRITERIA	NILAI PER-KABUPATEN/KOTA										
		Palu	Sigi	Donggala	Parimout	Poso	Morowali	Touna	Banggai	Tolitoli	Buol	Bangkep
<b>A.</b>	<b>Kriteria Dukungan Pemerintah Daerah</b>											
	Besarnya nilai Bobot dari kriteria ke k	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	Jumlah indikator untuk kriteria ke-k	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Nilai indikator tiap kriteria	6	9	9	8	6	4	7	8	7	6	7
	Nilai indikator terbesar, dalam hal ini 3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	<b>NILAI INDIKATOR KRITERIA (NIT) A</b>	<b>12,50</b>	<b>18,75</b>	<b>18,75</b>	<b>16,67</b>	<b>12,50</b>	<b>8,33</b>	<b>14,58</b>	<b>16,67</b>	<b>14,58</b>	<b>12,50</b>	<b>14,58</b>
<b>B.</b>	<b>Demografi</b>											
	Besarnya nilai Bobot dari kriteria ke k	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	Jumlah indikator untuk kriteria ke-k	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Nilai indikator tiap kriteria	3	8	6	8	5	5	8	4	7	4	5
	Nilai indikator terbesar, dalam hal ini 3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	<b>NILAI INDIKATOR KRITERIA (NIT) B</b>	<b>6,67</b>	<b>17,78</b>	<b>13,33</b>	<b>17,78</b>	<b>11,11</b>	<b>11,11</b>	<b>17,78</b>	<b>8,89</b>	<b>15,56</b>	<b>8,89</b>	<b>11,11</b>
<b>C.</b>	<b>Kondisi Biofisik Sumberdaya Hutan</b>											
	Besarnya nilai Bobot dari kriteria ke k	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
	Jumlah indikator untuk kriteria ke-k	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Nilai indikator tiap kriteria	12	8	10	8	9	7	9	10	10	7	9
	Nilai indikator terbesar, dalam hal ini 3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	<b>NILAI INDIKATOR KRITERIA (NIT) C</b>	<b>44,00</b>	<b>29,33</b>	<b>36,67</b>	<b>29,33</b>	<b>33,00</b>	<b>25,67</b>	<b>33,00</b>	<b>36,67</b>	<b>36,67</b>	<b>25,67</b>	<b>33,00</b>
	<b>TOTAL NILAI PRIORITAS (TNP)</b>	<b>63,17</b>	<b>65,86</b>	<b>68,75</b>	<b>63,78</b>	<b>56,61</b>	<b>45,11</b>	<b>65,36</b>	<b>62,22</b>	<b>66,81</b>	<b>47,06</b>	<b>58,69</b>
	<b>PEMBULATAN TNP</b>	<b>63,2</b>	<b>65,9</b>	<b>68,8</b>	<b>63,8</b>	<b>56,6</b>	<b>45,1</b>	<b>65,4</b>	<b>62,2</b>	<b>66,8</b>	<b>47,1</b>	<b>58,7</b>

Sumber : Hasil Pengolahan Data

#### D. Penentuan Kabupaten/Kota Prioritas

Berdasarkan data pada Tabel 28 di atas, maka dapat ditentukan kabupaten/kota prioritas lokasi *Demonstration Activities* (DA) REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana diuraikan pada **Tabel 29**.

**Tabel 29.** Kabupaten/kota Prioritas Lokasi *Demonstration Activities (DA)* REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah

No.	KABUPATEN/KOTA	TNP	URUTAN	KEPUTUSAN
1.	Palu	63,2	1	Prioritas
2.	Sigi	65,9	1	Prioritas Terpilih Lokasi DA REDD+ Ke-3
3.	Donggala	68,8	1	Prioritas Terpilih Lokasi DA REDD+ Ke-1
4.	Parigi Moutong	63,8	1	Prioritas Terpilih Lokasi DA REDD+ Ke-5
5.	Poso	56,6	2	Cukup Prioritas
6.	Morowali	45,1	3	Kurang Prioritas
7.	Tojo Una Una	65,4	1	Prioritas Terpilih Lokasi DA REDD+ Ke-4
8.	Banggai	62,2	1	Prioritas
9.	Tolitoli	66,8	1	Prioritas Terpilih Lokasi DA REDD+ Ke-2
10.	Buol	47,1	3	Kurang Prioritas
11.	Banggai Kepulauan	58,7	2	Cukup Prioritas

Sumber : Hasil Pengolahan dan Perhitungan Data

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengumpulan data/informasi/peta dalam rangka penentuan kabupaten/kota prioritas lokasi *Demonstration Activities* (DA) REDD+ Sulawesi Tengah dilaksanakan di 10 kabupaten dan 1 kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kriteria, bobot dan indikator yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan data/informasi/peta terdiri dari :
  - a. Kriteria dukungan pemerintah daerah, bobot sebesar 25%, dengan indikator meliputi : Distribusi Alokasi Anggaran Pembangunan, Organisasi/Lembaga Pengelola Hutan, Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat, dan Kerjasama Swasta/NGO dengan Masyarakat
  - b. Kriteria Demografi, bobot sebesar 20%, dengan indikator meliputi : jumlah desa, kepadatan penduduk, dan sumberdaya manusia.
  - c. Kriteria biofisik sumberdaya hutan, bobot 55%, dengan indikator meliputi : stock karbon, luas lahan kritis, luas kawasan hutan, penutupan lahan dan pengelolaan kawasan hutan.
3. Berdasarkan hasil perhitungan Total Nilai Prioritas (TNP) kabupaten/kota yang dinilai, urutan prioritas untuk 5 (lima) kabupaten/kota lokasi *Demonstration Activities* (DA) REDD+ di Provinsi Sulawesi Tengah adalah :
  - a. Kabupaten Donggala, dengan TNP sebesar 68,8
  - b. Kabupaten Tolitoli, dengan TNP sebesar 66,8
  - c. Kabupaten Sigi, dengan TNP sebesar 65,9
  - d. Kabupaten Tojo Una Una, dengan TNP sebesar 65,4
  - e. Kabupaten Parigi Moutong, dengan TNP sebesar 63,8

## **B. Rekomendasi**

Untuk memberikan landasan hukum yang pasti, direkomendasikan agar penetapan kabupaten/kota prioritas lokasi *Demonstration Activities* (DA) REDD+ Sulawesi Tengah dapat ditetapkan dalam Peraturan/Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Planologi. 2008. Buku Penghitungan Deforestasi Indonesia Tahun 2008. Pusat Inventarisasi Perpetaan Badan Planologi, Departemen Kehutanan. Jakarta.
- [BPS] Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. 2010. *Booklet* Hasil Sensus Penduduk 2010 Provinsi Sulawesi Tengah. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Palu.
- Grimes, B.F. 1996. *Part of the Ethnologue in Indonesia: Sulawesi.13<sup>th</sup> Edition*. Summer Institute of Linguistics, Inc. Dallas, USA.
- Marthen, T.L. 2003. Fauna Endemik Sulawesi: Permasalahan dan Usaha Konservasi.
- Anoninuous, 2011, Laporan Hasil Pengumpulan Data/Informasi/Peta Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah, Tim Pengumpul Data/Informasi/Peta Kelompok Kerja REDD+ Sulawesi Tengah

UN-REDD Programme Indonesia merupakan kerja sama kemitraan antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations Development Programme (UNDP), dan United Nations Environment Programme (UNEP). Program ini mendukung upaya pemerintah Indonesia menurunkan kadar emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (*Deforestation and Forest Degradation*)